

Implementasi Sanksi Berjenjang bagi Pelanggar Tatakrama dan Tata Tertib pada Siswa SMA Negeri 2 Cibeber Lebak

Stevany Afrizal, Denny Soetrisnaadisendjaja, Jedah Nurlatifah

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
stevanyafrizal@untirta.ac.id

Abstrak

Sekolah memiliki sanksi berjenjang bagi warganya yang tidak dapat mentaati peraturan tersebut sesuai dengan tingkat pelanggaran siswa. Sanksi sangat penting diterapkan bagi siswa agar tetap pada jalur yang sesuai dengan ketentuan sekolah.prosedur. Penelitian ini telah berusaha mendeskripsikan implementasi sanksi berjenjang yang diterapkan bagi siswa yang melanggar tata tertib di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber Lebak. Prosedur penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan pedoman observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) sanksi berjenjang bagi siswa pelanggar tatakrama dan tata tertib di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber lemah dalam implementasinya. Ditunjukkan dengan banyaknya kasus pelanggaran yang tidak mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. (2) hal yang melatarbelakangi yaitu: perilaku siswa yang sudah menjadi habitus dalam melanggar sehingga sulit dirubah dan dihilangkan. Lemahnya tindakan sekolah dalam memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar, adanya pengaruh kultur siswa dan masyarakat sekitar, pengaruh jabatan siswa di sekolah, pengaruh relasi siswa dengan guru, dan pengaruh ekonomi siswa.

Kata-kata Kunci: tata tertib; pelanggaran; sanksi; siswa.

Abstract

Schools have tiered sanctions for students accordance with the level of student violations. Sanctions are very important to be applied for students with school conditions. Research has to attempted to describe the implementation of tiered sanctions that are applied to students who violate the rules of the Senior High School Negeri 2 Cibeber. The research prosedure is qualitative with a descriptive approach, with guidelines for observation, interviews, and documentation. Based on the results it can be concluded: (1) tiered sanctions for students who violate manners and discipline in Cibeber Negeri 2 Senior High School are weak in its implementation. Shown by the number of violation cases that did not get sanctions according to the level of violations. (2) that is because: student behavior that has become habitus in viola-tion so that it is difficult to change and be eliminated. Weak school actions in giv-ing sanctions to students who violate, the influence of the culture of students and the surrounding community, the influence positions in school, the influence relations with teachers, and the economic influence.

Keywords: order; offender; sanctions; students.

Pendahuluan

Penelitian ini membahas mengenai implementasi sanksi berjenjang pada pelanggar tatakrama dan tata tertib pada siswa SMA Negeri 2 Cibeer Lebak. Secara umum tata tertib sekolah dapat diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah di tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (Irwansa,2014:2).

Tata tertib sekolah dibentuk untuk tujuan mendisiplinkan siswa agar setiap perilaku siswa sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, tata tertib bertujuan agar sekolah tetap aman, fasilitas sekolah terjaga, siswa belajar dengan nyaman, dan terjalin kerukunan pada setiap siswa dan guru. Dengan terlaksananya tata tertib, sekolah akan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas, bermoral dan berakhlak mulia.

Selain tata tertib, sekolah pun memiliki hukuman bagi setiap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Hukuman atau sanksi di sekolah merupakan *reinforcement* yang negatif, tapi jika diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi (Sardiman,2012:94). Artinya sanksi merupakan konsekuensi yang bersifat negatif karena tentu tidak diinginkan oleh orang yang mendapatkannya, namun jika diterapkan dengan tepat akan menjadi motivasi bagi orang yang mendapatkannya seperti menyadarkan, membuat jera sehingga tidak akan mengulang pelanggaran, dan lainnya. Sanksi yang diberikan di sekolah tentu memiliki kriterianya sendiri, berbeda pelanggaran maka berbeda pula sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat

pelanggaran siswa yang biasa disebut sanksi berjenjang.

SMA Negeri 2 Cibeer merupakan sekolah tingkat atas yang berdiri dan mendapatkan izin operasional dari Kementerian Pendidikan pada tahun 2011, tetapi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeer merupakan satu-satunya Sekolah Menengah Atas yang berada di Desa Citorek Kecamatan Cibeer Kabupaten Lebak yang terdiri dari lima Desa. Tidak ada seleksi khusus untuk penerimaan siswa baru di SMAN 2 Cibeer. Siswa berkemampuan akademis seperti apapun diterima menjadi siswa dengan syarat telah lulus SLTP.

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeer memiliki tata tertib sekolah yang biasa disebut tatakrama dan tata tertib sekolah. Tatakrama dan tata tertib sekolah ini dibuat untuk mengatur siswa SMA Negeri 2 Cibeer agar disiplin sama halnya dengan tata tertib sekolah-sekolah pada umumnya. Selain tatakrama dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 2 Cibeer terdapat pula sanksi yang diberikan bagi siswa pelanggar tatakrama dan tata tertib sekolah. Sanksi-sanksi yang disahkan di SMA Negeri 2 Cibeer terdapat pada SK Kepala Sekolah SMAN 2 Cibeer No.800.2-005/SMAN.2/2014 yaitu terdapat tiga klasifikasi sanksi, sanksi ringan, sedang, hingga berat. Klasifikasi tersebut sesuai berdasarkan klasifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siswa.

Pada umumnya, setiap siswa yang melanggar tata tertib di sekolah akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ringan-beratnya sanksi yang dilakukan oleh siswa. Namun pada kasus di SMA Negeri 2 Cibeer beberapa sanksi tidak terlaksana atau diterapkan kepada siswa pelanggar tatakrama dan tata tertib sekolah sebagai efek jera kepada siswa.

Berdasarkan data dokumen catatan kasus siswa dan data primer pada periode 2011-2018, SMA Negeri 2 Cibeber hanya memberikan sanksi berupa nasihat untuk siswa yang membawa rokok/merokok di lingkungan sekolah, lalu meminta siswa membuat pernyataan tidak mengulang pelanggaran pada kasus tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama kurang lebih 2 bulan, serta pemanggilan orangtua ke sekolah. Sedangkan untuk kasus pelanggaran berat hamil/menghamili sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa secara formal dari sekolah, namun siswa sendiri yang mengeluarkan diri secara nonformal dari sekolah, bahkan pada tahun 2016 pada kasus pelanggaran berat hamil/menghamili siswa tetap dapat mengikuti ujian. Data tersebut membuktikan beberapa sanksi belum diterapkan oleh sekolah, karena tidak ada sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran siswa yang bersifat ringan dan sedang.

Dalam penerapan sanksi di sekolah, elemen yang sangat berperan penting yaitu guru. Seorang guru harus mampu bersikap tegas dalam membimbing siswa dan mampu memberikan konsekuensi atas tindakan siswa yang tidak sesuai dengan tatakrama dan tata tertib sekolah. Seperti dikatakan dalam (Rifai,2011:115) bahwa di dalam situasi formal yaitu pada saat pembelajaran di kelas guru harus menunjukkan kewibaan dan otoritasnya. Bahkan jika diperlukan guru dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa siswa untuk belajar, melakukan tugasnya sebagai siswa, atau mematuhi peraturan

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Tata Tertib Sekolah

a. Definisi Tata Tertib Sekolah

Menurut (Irwansa,2014:2) secara umum tata tertib sekolah dapat

diartikan sebagai aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah di tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Mulyono (dalam Rifai, 2011:140) tata tertib sekolah pula memuat aturan-aturan dan peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten (taat asas) dari peraturan yang ada. Tata tertib merupakan sekumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat anggota masyarakat.

Tata tertib merupakan aturan-aturan ketertiban dalam keteraturan terhadap tata tertib sekolah merupakan kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan. Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ketertiban sekolah tersebut dituangkan dalam sebuah tata tertib sekolah (Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 158/C/Kep/T.81 Tanggal 24 September 1981, Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang, 1989:145).

b. Tujuan Tata Tertib Sekolah

Secara umum, tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik hingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah diharuskan. Dianjurkan, dan ada yg tidak boleh dilakukan dalam pergaulan lingkungan sekolah.

Menurut Wiratomo (dalam Rifai,2011:141) Tata tertib sekolah dibuat dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

- Agar siswa mengetahui hak dan kewajibannya;
- Agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas
- Meningkatkan serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya.
- Agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

c. Isi Tata Tertib Sekolah

Tata tertib sekolah sebagaimana tercantum di dalam Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14/4/1974 Tanggal 1 Mei 1974 mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

- Tugas dan kewajiban
- Larangan-larangan bagi para siswa
- Sanksi-sanksi bagi siswa.

Tata tertib sekolah baik yang berlaku umum maupun khusus, meliputi tiga unsur berikut:

- Perbuatan atau tingkah laku yang diharuskan dan yang dilarang
- Akibat atau sanksi yang menjadi tanggung jawab pelaku atau pelanggar peraturan
- Cara atau prosedur untuk menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut.

Tata tertib sekolah termasuk dalam administrasi ko-kurikulum, yaitu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah untuk menunjang dan meningkatkan daya dan hasil guna kegiatan kurikulum.

Arikunto (dalam Rifai, 2011: 142) berpendapat batasan antara peraturan dan tata tertib sekolah yaitu:

- Peraturan merupakan patokan atau standar yang sifatnya umum yang harus

dipenuhi oleh siswa. Misalnya, peraturan tentang kondisi yang harus dipenuhi siswa di dalam kelas pada waktu pelajaran sedang berlangsung.

- Tata tertib sekolah menunjuk pada patokan atau standar yang sifatnya khusus yang harus dipenuhi oleh siswa. Tata tertib sekolah menunjuk kepada patokan atau standar untuk aktivitas khusus, seperti penggunaan pakaian seragam, penggunaan laboratorium, mengikuti upacara bendera, mengerjakan tugas rumah, pembayaran SPP, dan sebagainya.

2. Konsep Disiplin dan Hukuman

a. Disiplin

Teori disiplin dan hukuman dikemukakan oleh Michel Foucault seorang sosiolog, filsuf, sejarawan, sekaligus psikolog dari Prancis. Foucault (dalam Martono, 2014:100) meluaskan penjelasannya mengenai penjara hukuman, dan disiplin ini untuk menjelaskan perubahan praktik pendidikan dalam masyarakat modern. Tetapi ada satu hal yang perlu diingat bahwa Foucault sama sekali tidak menyamakan penjara dan sekolah, akan tetapi sekolah dan penjara menanamkan pola-pola sosial atau tujuan dan arah yang sama. Keduanya sama-sama membenarkan bahwa adanya sistem kekuasaan yaitu guru terhadap murid dan melakukan praktik pendisiplinan. Di sekolah dan di penjara terdapat peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh penghuninya, misalnya ditandai dengan suara bel atau lonceng untuk membatasi kegiatan, dan tempat untuk membatasi kekuasaan.

Disiplin dipandang sebagai sebuah teknologi kekuasaan masyarakat modern. Pendisiplinan adalah sebuah mekanisme pembentukan perilaku

individu yang taat dan patuh pada serangkaian norma melalui sistem kontrol atau pengawasan terhadap individu. Pendisiplinan merupakan mekanisme kekuasaan yang dilakukan untuk membentuk tubuh yang terampil dan berguna. Ia juga merupakan mekanisme kekuasaan yang positif.

Artinya, Foucault melihat sekolah sebagai tempat praktik mendisiplinkan dan menguasai, dalam arena pendidikan yaitu murid sebagai penghuni sekolah. Sekolah dapat menjadi tempat untuk menumbuhkan sikap-sikap dan perilaku individu sehingga seperti apa yang tertera dalam peraturan-peraturan yang sudah tertera. Adapun sekolah sebagai sarana praktik kekuasaan yaitu melihat bahwa penjara atau dalam hal ini sekolah ada individu atau kelompok yang berperan sebagai subjek dan ada yang berperan sebagai objek. Dalam lingkup sekolah yang menguasai yaitu guru terhadap staf di bawahnya, guru dan staf terhadap siswanya. Dimana adanya jarak-jarak tertentu yang terbatas yang tidak terlampaui oleh siswa.

b. Hukuman atau Sanksi

Pada kutipan Oliver (dalam Martono, 2014: 83-84) dikemukakan bahwa pada abad ke-19 hukuman yang ekstrim telah berubah dalam sistemnya. Perubahan ini diakibatkan karena masyarakat telah mengenal sistem organisasi pemerintahan yang mengatur tata perilaku individu, dan di dalam organisasi tersebut ada pembagian peran dan fungsi lembaga secara jelas. Faktor berikutnya adalah faktor modernisasi yang menyebabkan hilangnya adat istiadat atau norma-norma kuno (tradisional) yang dianut masyarakat sebelumnya. Moralitas masyarakat juga semakin berkembang,

sehingga sebuah kejahatan telah dilihat sebagai pelanggaran etika. Artinya, dapat dipahami bahwa sanksi-sanksi yang berlaku pada masyarakat semakin mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, dan seiring masyarakat semakin mengetahui hal-hal yang lebih rasional dan terstruktur. Sehingga pada taraf hukuman yang diberlakukan pada masyarakat lebih manusiawi dan lebih kepada etika dan moral.

Pada zaman dahulu hukuman yang berlaku ialah hukuman fisik. Namun bila diterapkan dalam masyarakat modern hukuman fisik identik dengan pendidikan kemiliteran yang dekat dengan nuansa tradisional dan penuh kekerasan. Hukuman di sekolah-sekolah yang menganut ideologi konservatif cenderung menggunakan hukuman fisik yang diberlakukan kepada muridnya seperti memukul, mencubit, bahkan hingga meminta anak untuk melakukan *push up* dan *sit up* sebagai ganjaran atas ketidakpatuhan pada perintah guru. Para penganut hukuman konservatif berpendapat bahwa hukuman fisik adalah hukuman yang paling tepat dan dianggap dapat mengubah perilaku murid. Hukuman ini lebih mengedepankan tujuan agar murid jera dan tidak mengulang kembali pelanggaran yang dibuatnya dan pelajaran bagi siswa lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, hukuman ini bertujuan membuat murid menjadi malu di depan teman-temannya karena hukuman ini lebih sering dilakukan di kelas dengan disaksikan murid yang lainnya.

Menurut Foucault (dalam Martono, 2014: 102), hukuman fisik yang diterapkan di sekolah masih menunjukkan sikap dominan seorang

guru di sekolah. Di sekolah, guru di posisikan sebagai subjek pendidikan dan murid sebagai objek pendidikan; guru adalah penguasa di kelas, sedangkan murid menjadi pihak yang dikuasai; sehingga murid harus mentaati perintah guru. Jadi dalam hal ini ada relasi yang tidak seimbang antara murid dengan guru.

Artinya, dalam penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukuman atau sanksi pada masyarakat modern dilihat sebagai sanksi yang diberikan kepada pelanggar-pelanggar yang berlawanan dengan norma-norma yang sudah ditetapkan dalam masyarakat dimana sanksi tersebut bersifat manusiawi. Faucault (dalam Martono,2014:97) mengatakan bahwa “dalam penjara atau dalam arena sanksi tersebut terdapat pengenalan terhadap nilai dan norma layaknya sistem sosial dalam masyarakat umum di luar penjara”. Artinya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar peraturan bersifat nilai-nilai moral yang ditanamkan untuk menanamkan nilai dan menumbuhkan sikap moral pada para pelanggar peraturan.

Secara lebih sederhana hukuman atau sanksi di sekolah merupakan *reinforcement* yang negatif, tapi jika diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi (Sardiman,2012:94). Artinya sanksi merupakan konsekuensi yang bersifat negatif karena tentu tidak diinginkan oleh orang yang mendapatkannya, namun jika diterapkan dengan tepat akan menjadi motivasi bagi orang yang mendapatkannya seperti menyadarkan, membuat jera sehingga tidak akan mengulang pelanggaran, dan lainnya. Sanksi yang diberikan di sekolah tentu memiliki kriterianya sendiri, berbeda

pelanggaran maka berbeda pula sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran siswa yang biasa disebut sanksi berjenjang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pelaksanaan teknik pemeriksaan dan keabsahan data memiliki kriteria tertentu, yaitu: derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dipendability*), dan kepastian (*confirmability*).

C. HASIL PENELITIAN

1. Perilaku Siswa Pelanggar Tatakrama dan Tertib Sekolah

Setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Karakter tersebut membedakan perilaku antara siswa satu dengan siswa lain. Sebagian siswa mengikuti tatakrama dan tata tertib sekolah, dan sebagian lain justru bertolak belakang dengan tatakrama dan tata tertib sekolah.

Terdapat beberapa kebiasaan dan perilaku siswa yang sudah melekat dalam diri siswa dan terus menerus dilakukan oleh siswa yaitu:

a. Melanggar Tatakrama dan Tata Tertib Sekolah

Kebiasaan siswa yang sudah menjadi habitus dalam hal ini yaitu pelanggaran terhadap tatakrama dan tata tertib sekolah yang dilakukan secara berulang, yang sudah melekat dalam diri siswa sehingga sudah menjadi karakter siswa tersebut, bahkan mempengaruhi dirinya dan

mengendalikan serta mengatur perilaku individu tanpa ia sadari mengakibatkan kendala bagi elemen lain dalam arena sekolah yang dalam hal ini yaitu sanksi di sekolah.

Pelanggaran yang dilakukan siswa yang sudah berulang kali dilakukan bahkan sangat sulit untuk dihilangkan mengakibatkan beberapa sanksi tidak dapat diterapkan di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber. Hal demikian terjadi karena terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan siswa yang berulang dan terus menerus, bahkan siswa tidak merasa jera ketika diberikan sanksi berupa nasihat, *push up*, menghormat bendera, ataupun surat perjanjian. Sanksi tersebut hanya sebatas “kenangan berlalu” bagi siswa yang melanggar.

Dari pernyataan di atas, Bordieu menjelaskan bahwa kebiasaan individu yang sudah menjadi habitus akan melekat dalam diri individu dan akan sulit untuk berubah karena sudah menjadi perilaku individu. Habitus siswa yang sulit dirubah dikarenakan oleh habitus tersebut sudah melekat sebelum siswa memasuki jenjang Sekolah Menengah Atas dan terus menerus dilakukan oleh siswa hingga sekarang dan pada arena yang berbeda pun habitus tersebut tetap melekat pada diri siswa hingga menjadi karakter siswa. Artinya habitus siswa yang terlambat masuk ke sekolah sudah terpolo dalam diri siswa ketika siswa SMP hingga pada jenjang SMA. Habitus melanggar siswa yang terus berulang tanpa rasa jera merupakan kendala besar bagi sekolah dalam menerapkan sanksi terutama sanksi berjenjang atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran siswa.

b. Tidak Memiliki Rasa Segan Terhadap Guru

Siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah secara berulang umumnya karena salah satunya tidak ada perasaan takut pada guru ataupun staf sekolah. Menurut Bordieu habitus secara tidak di sadari oleh individu dapat merubah sifat dan perilaku individu kemudian mengatur diri individu. Ketika di lingkungan sekolah, siswa tidak sama sekali memiliki rasa segan dan hormat kepada elemen sekolah yang dalam hal ini adalah *security*, bahkan ketika pelanggaran mereka diketahui mereka sama sekali tidak memiliki perasaan takut, bahkan mereka menantang. Dalam hal ini, habitus betul-betul telah melekat dalam diri siswa dan sudah menjadi karakter siswa sehingga habitus tersebut justru yang mengatur tindakan siswa.

2. Lemahnya Tindakan Sekolah Terhadap Siswa yang Melanggar

Sekolah merupakan arena tempat siswa diatur oleh tatakrama dan tata tertib yang diberlakukan di sekolah. Bagi siswa yang melanggar tatakrama dan tata tertib tersebut, maka guru sebagai penanggung jawab terhadap perbuatan tersebut. Guru bukan hanya sebagai pengajar, namun juga pendidik siswa di arena sekolah. Tugas guru bukan hanya memberikan materi di kelas, namun lebih dari itu guru menanamkan sikap disiplin kepada siswa di sekolah.

Tanggung jawab penting yang harus dilakukan oleh guru di sekolah untuk mensukseskan pendidikan karakter yaitu dengan menumbuhkan sikap disiplin kepada siswa terutama disiplin diri. Disiplin diri peserta didik bertujuan untuk membantu mengatasi masalah-masalah kedisiplinan, serta

berusaha menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga siswa dapat mentaati peraturan yang diberlakukan di sekolah.

a. Sekolah Sebagai Tempat Diberlakukannya Tatakrama, Tata Tertib dan Sanksi Berjenjang

Sekolah sebagai arena pendidikan seharusnya memiliki hukum-hukum yang mengatur dan mengendalikan perilaku agen atau dalam hal ini yaitu siswa (Bordieu, 2015: 513). Pada kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber sekolah sebagai arena pendidikan belum sepenuhnya menerapkan hukum-hukum keberfungsian untuk menstrukturkan siswa di sekolah. Guru dalam hal ini merupakan elemen sekolah yang bertanggung jawab dalam menerapkan hukum-hukum tersebut. Hukum-hukum dalam sekolah yaitu tatakrama dan tata tertib serta sanksi berjenjang yang berlaku ketika tata tertib dilanggar oleh siswa sesuai dengan level pelanggarannya.

Sanksi yang berlaku kepada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah seharusnya diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa. Namun pada kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeber sanksi belum sepenuhnya terimplementasi karena elemen sekolah kurang tegas dalam memberikan wewenangnya untuk menerapkan sanksi kepada siswa.

Pada wawancara antara guru dengan siswa, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tidak langsung ditindak tegas oleh guru, guru tidak memberikan sanksi yang lebih lanjut, bahkan guru tidak memasukkan kasus pelanggaran siswa ke dalam catatan kasus kelas. Artinya bahwa dalam hal ini arena tidak sepenuhnya melaksanakan

hukum-hukum yang seharusnya berfungsi untuk mengatur agen di dalam arena.

Arena yang seharusnya membentuk karakter siswa dengan hukum keberfungsian yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi kepada siswa dalam kasus ini arena justru bersifat longgar dalam memberikan sanksi dan menindak lanjut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Artinya bahwa sekolah atau elemen-elemen sekolah seperti guru dan staf tidak tegas kepada siswa yang melanggar, sehingga sanksi-sanksi yang seharusnya diterapkan dengan sebagaimana mestinya, belum terimplementasi dengan baik.

b. Sekolah Sebagai Tempat Bersaing Bagi Siswa

Sekolah bukan saja sebagai tempat untuk mendisiplinkan siswa dengan berbagai aturan di dalamnya. Namun sekolahpun sebagai ruang bagi siswa untuk bersaing dengan siswa lainnya dalam bidang akademik maupun non akademik. Sebagai contoh nyata salah satunya yaitu ketika pembagian program studi IPA dan IPS. Pada momen tersebut siswa ditempatkan sesuai dengan kemampuan akademis dan kemampuan sosial yang dimiliki.

Dikatakan Bordieu bahwa modal siswa pun menentukan kelas siswa. Bagi siswa yang memiliki kemampuan akademis di bidang IPA maka siswa akan berada di kelas IPA, bagitupun sebaliknya bagi siswa yang memiliki kemampuan di bidang IPS maka siswa akan berada di kelas IPS. Bahkan wali kelas XII IPA menjelaskan bahwa siswa yang kemampuannya lebih baik rata-rata berada di kelas IPA.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa arena sekolah bukan saja sebagai tempat mendidik siswa namun juga sebagai tempat siswa

dilatih untuk bersaing dalam bidang akademis. Secara tidak langsung pembagian kelas antara IPA dan IPS telah mengkotakan siswa-siswa yang memiliki nilai akademis baik dan nilai akademis yang kurang baik. Seperti dijelaskan oleh wali kelas XII IPA bahwa sebagian besar siswa yang berperilaku buruk atau yang memiliki nilai akademik kurang baik maka siswa berada di kelas IPS. Bahkan pada beberapa kejadian ada beberapa siswa yang pindah dari kelas IPA ke kelas IPS karena tidak mampu dalam mata pelajaran di kelas IPA.

3. Adanya Pengaruh Budaya, Relasi Sosial, Kehormatan/Jabatan, dan Ekonomi/Materi.

Kapital/modal merupakan sesuatu yang dimiliki agen untuk bertahan di dalam arena. Modal dalam berbagai bentuknya membantu individu bertahan pada masa tertentu (Schaefer, 2012: 14). Kapital dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu sesuatu yang dimiliki siswa untuk bertahan di dalam arena sekolah. Kapital/ modal tidak dapat terpisahkan dengan habitus dan arena, ketika habitus siswa yang kurang baik tertanam dalam diri siswa yang kemudian habitus tersebut.

a. Pengaruh Budaya/Kultural

Bagi Bourdieu, modal tidak hanya berbentuk barang material, tetapi juga terdapat modal budaya (*cultural capital*) mengacu pada benda nonekonomi seperti latar belakang keluarga dan pengetahuan dalam hal ini yaitu modal intelektual atau modal akademis siswa. (Schaefer, 2012: 14).

Orangtua sebagai modal kultural siswa berpengaruh terhadap sanksi yang diberikan sekolah kepadanya. Ketika siswa harus mendapat sanksi

yang berat akibat pelanggaran berat, namun pada praktiknya modal kultural siswa dapat mencegah hal tersebut. dalam hal ini modal kultural sebagai pendukung agen siswa dalam arena sekolah sehingga siswa dapat bertahan dalam arena tersebut.

Ketika orangtua siswa memiliki latar belakang pendidikan rendah itu akan berdampak pada kesadaran mereka akan pendidikan anak yang kurang peduli, kemudian hal tersebut berdampak pula terhadap sanksi yang diberikan oleh wali kelas kepada siswa. Ketika wali kelas menginginkan kerjasama kepada orangtua untuk memberikan teguran kepada siswa yang melanggar di sekolah, justru orangtua malah memaklumi pelanggaran tersebut, hal tersebut akan menjadi sia-sia bagi sekolah sehingga guru terutama wali kelas merasa percuma menerapkan sanksi di sekolah, karena ketika siswa tersebut masuk ke dalam lingkungan keluarga, orangtua justru memaklumi hal tersebut.

Selanjutnya ketika siswa memiliki modal akademis yang rendah, makapada saat tertentu siswa akan lari dari tanggung jawabnya yaitu dengan meninggalkan pembelajaran di sekolah akibat tidak mampu mengerjakan tugas pada mata pelajaran tertentu. Padahal modal akademis ini sangat dibutuhkan oleh siswa agar siswa mampu bertahan dan bersaing dalam arena sekolah.

Modal akademis siswa yang rendah pada mata pelajaran tertentu akan terus membuat siswa sebisa mungkin lari ketika sedang ada jadwal mata pelajaran tersebut, hal itu dilakukan secara berulang oleh siswa sehingga menambah daftar penjang alasan-alasan siswa melakukan

pelanggaran sekolah, dan hal inipun menjadi hambatan bagi penerapan sanksi akibat banyaknya siswa yang melakukan pelanggaran bahkan pada saat siswa tidak paham akan pelajaran tertentu. Jika siswa berniat sekolah, banyak jalan yang dapat dilakukan agar bisa paham pada mata pelajaran tertentu dan seharusnya siswa dapat bertanya pada teman sekelas ataupun pada guru yang bersangkutan.

b. Pengaruh Relasi Sosial

Pierre Bourdieu dalam (Damsar, 2012:183) menjelaskan modal sosial merupakan sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang berbentuk pengakuan dan timbal balik dengan kata lain yang memberikan kepada seseorang dukungan kolektif.

Penjelasan sederhana mengenai modal sosial yaitu dimana agen memiliki jaringan sosial di dalam arena yang mendukung agen di dalam arena tersebut. Pada penelitian ini, modal sosial atau jaringan sosial yaitu dimana adanya kedekatan antara siswa dengan guru sehingga mengakibatkan interaksi tanpa batas antara guru dengan siswa baik di dalam maupun di luar arena sekolah.

Jaringan sosial atau hubungan antara guru dengan siswa memberikan pengaruh bagi siswa. Ketika seorang guru di sekolah umumnya menjadi pendidik bagi siswa namun menjadi akrab dengan siswa di arena sekolah ataupun di luar sekolah, modal sosial tersebut akan melewati batas wajarnya. Karena bagaimanapun modal ini adalah sesuatu yang mendukung dan di butuhkan agen dalam arena. Siswa yang memiliki jaringan sosial dengan guru melewati batas, maka siswa akan kehilangan rasa hormat terhadap guru karena siswa sadar bahwa dirinya

memiliki relasi sosial dengan guru tersebut.

c. Pengaruh Kehormatan/ Jabatan

Modal simbolis dijelaskan Bourdieu yaitu modal prestise/kehormatan, jabatan. Modal simbolis ini berupa simbol-simbol yang dimiliki oleh agen dalam hal ini yaitu siswa. Beberapa sanksi tidak terimplementasi kepada siswa yang memiliki simbol-simbol di sekolah.

Modal simbolis dibutuhkan siswa untuk dapat melakukan relasi dengan siswa lain bahkan dengan guru, modal ini akan membuat siswa lebih dekat dengan siswa lain dan lebih dekat dengan guru. Meskipun hanya sedikit pengaruhnya, tetapi pada siswa yang memiliki simbol-simbol di sekolah beberapa guru memaklumi pelanggaran yang mereka buat sehingga pemakluman tersebut mengakibatkan sanksi belum dapat terimplementasikan pada siswa.

d. Pengaruh Ekonomi/ Materi

Modal ekonomi dijelaskan Bordieu yaitu modal materi atau modal yang berwujud bentuknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu modal materi yang dimiliki siswa untuk dapat layak berada dalam lingkungan sekolah seperti bersersagam lengkap dari topi, dasi, ikat pinggang, sepatu sesuai ketentuan sekolah. Pada kasus di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Cibeer, masih banyak siswa yang kurang lengkap dalam menggunakan atribut di lingkungan sekolah, seperti ke sekolah hanya memakai sandal.

Meskipun modal materi tidak terlalu berpengaruh terhadap implementasi sanksi, namun beberapa kasus membuktikan bahwa atribut siswa yang kurang lengkap ketika di lingkungan sekolah menjadi hal yang

dimaklumi oleh sekolah, karena kehadiran siswa ke sekolah jauh lebih penting dibandingkan seragam sekolah yang tidak lengkap. Bahkan ada beberapa siswa yang tidak lengkap menggunakan seragam sekolah karena memang kendala dalam materi, meskipun memang jarang sekali di temukan kasus tersebut.

Kesimpulan

Perilaku siswa yang cenderung melakukan pelanggaran tatakrama dan tata tertib sekolah secara berulang tanpa rasa segan terhadap guru, serta habitusnya tersebut sulit di rubah karena sudah berproses dari siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas. Beberapa siswa beralasan sering melakukan pelanggaran akibat dukungan lingkungan, serta karena karakternya yang sudah buruk. Akibatnya sanksi yang diberikan oleh guru tidak terimplementasi karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Pada akhirnya timbul pengaruh bagi lingkungan pergaulan siswa maupun sekolah yang berdampak pada tidak terimplementasinya sanksi yang seharusnya diberikan kepada siswa.

Sekolah sebagai tempat diberlakukannya sanksi memiliki tindakan yang lemah terhadap siswa yang melanggar tatakrama dan tata tertib sekolah. beberapa pelanggaran yang dilakukan siswa tidak diberikan sanksi sebagaimana mestinya serta sanksi yang berlaku hanya teguran, nasihat, push up, membuat surat perjanjian, hormat bendera, tanpa ada sanksi lain yang lebih berat. Selain itu, sekolahpun sebagai tempat siswa bersaing dengan siswa lain baik secara

akademis maupun non akademis, salah satunya yaitu dengan adanya tes akademis untuk pengklasifikasian kelas IPA dan IPS, dengan ada klasifikasi kelas tersebut menjadikan adanya anggapan kelas baik dan kelas buruk sehingga pada kelas baik tersebut sekolah cenderung lemah dalam penerapan sanksi.

Adanya beberapa modal sebagai pendukung siswa di sekolah yang berpengaruh terhadap lemahnya beberapa sanksi pada siswa yang melakukan pelanggaran. Latar belakang keluarga sebagai modal kultural berpengaruh terhadap kebijakan sekolah dalam memberlakukan sanksi, ketika keluarga siswa memiliki kesadaran pendidikan yang lemah sehingga tidak sepenuhnya mendukung kegiatan siswa di sekolah akibatnya banyak siswa yang berperilaku buruk dengan melanggar tata tertib sekolah. Selanjutnya relasi sosial antara guru dan murid yang terjalin melampaui batas pun berpengaruh terhadap siswa, ketika siswa melakukan pelanggaran siswa tidak merasa takut karena dirinya memiliki relasi sosial dengan guru, sehingga meskipun siswa melakukan pelanggaran di sekolah, siswa tetap dalam kondisi aman. Selanjutnya, siswa yang memiliki jabatan tertentu di sekolah jarang diperhatikan sisi buruk siswa sebagai pelanggar tata tertib sekolah karena siswa di sisi lain memiliki kekuatan dengan jabatan yang dimilikinya. Meskipun tidak terlalu berpengaruh, tetapi banyak siswa yang tidak memiliki modal ekonomi tetap dapat masuk ke dalam lingkungan sekolah dan tidak ada sanksi untuk hal tersebut meskipun termasuk ke dalam pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bourdieu, Pierre. 2015. *Arena Produksi Kultural (Sebuah Kajian Sosiologi Budaya)*. Sidorejo: Kreasi Wacana
- Martono, Nanang. 2014. *Sosiologi Pendidikan Michael Foucault (Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman Dan Seksualitas)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Rifai, Muhammad. 2011. *Sosiologi Pendidikan (Struktur Dan Interaksi Sosial Dalam Institusi Pendidikan)*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sardiman. 2012. *Interaksi Dan Motivasi Belajar-Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Schaefer, Richard T. 2012. *Sosiologi (Sociology)*. Jakarta: Salemba Humanika